

ANALISIS KAUSALITAS UPAH MINIMUM DAN TINGKAT INFLASI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2000 – 2020

Feri Widiyanto, Yuni Prihadi Utomo

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email Corresponding:

Email: b300190087@student.ums.ac.id, yp196@ums.ac.id

Abstract.

This study aims to determine the pattern of causality relationship between minimum wage and inflation rate in Central Java province in 2000-2020. The data used in this study were obtained through BPS (Central Bureau of Statistics) of Central Java province. The research method used is the Granger causality test. The results showed that the inflation variable (INF) was stationary at the level level while the provincial minimum wage variable (UMP) was stationary at the 2nd difference level. The results of the Granger causality test lag 1 to 5, all of which have empirical significance of F statistics > 0.10, indicate that there is no causal relationship between the provincial minimum wage and the inflation rate in Central Java province during 2000-2020. This reveals that the macroeconomic conditions of Central Java are still underemployment, so that when there is an increase in the minimum wage, the effect of an increase in aggregate demand does not cause an increase in production costs that can trigger cost push inflation. Inflation does not appear to be considered in determining the provincial minimum wage policy.

Keywords: *Inflation, Minimum Wage, Granger Causality Test*

PENDAHULUAN

Upah minimum adalah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk perusahaan. Kenaikan upah minimum ditunjukkan dengan peningkatan jumlah permintaan barang dan jasa, oleh karena itu peningkatan jumlah permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan jumlah produksi meningkat, selain itu juga dapat menyebabkan peningkatan pendapatan. Kenaikan upah memang dapat meningkatkan kesempatan kerja, karena dengan naiknya tingkat upah diharapkan juga terjadi peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi (Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018).

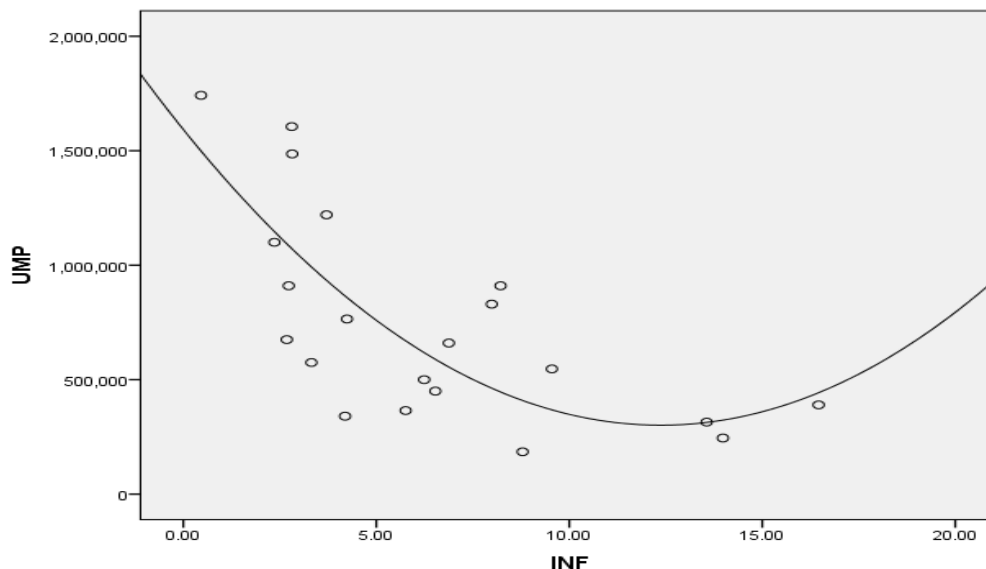
Inflasi adalah kecenderungan harga barang naik secara terus menerus. Kenaikan harga barang bersifat menyeluruh, jika hanya beberapa jenis barang saja maka tidak dikatakan inflasi kecuali jika kenaikan harga satu barang meluas dan berimbas pada kenaikan barang-barang lainnya. Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat yang selama ini memiliki pendapatan tetap, juga dapat mengurangi nilai kekayaan masyarakat seperti uang simpanan di bank dan uang tunai yang dimiliki (Sukirno, 2013).

Pada satu sisi inflasi dapat disebabkan oleh kurangnya produksi dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Sementara itu pada sisi lain, inflasi dapat juga disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dalam suatu perusahaan, yang akan mengakibatkan meningkatnya harga hasil produksi. Menurut (M Nopirin, 2013) *Cost Push Inflation* pada dasarnya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi. *Cost Push Inflation* ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

Pada tahun 2022 upah minimum provinsi Jawa Tengah merupakan paling rendah di pulau Jawa. Adapun, pemerintah telah menetapkan rata rata kenaikan upah minimum provinsi nasional

pada tahun 2022 sebesar 1,09% bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan baru yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Tercatat DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi di pulau Jawa pada tahun 2022 sebesar Rp4.453.935 diikuti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, serta Jawa Tengah dengan UMP sebesar Rp1.812.935 (Annur, 2022). Presentase upah minimum provinsi Jawa Tengah dan tingkat Inflasi provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2020 tersaji pada Grafik 1.

Grafik 1
Persentase upah minimum dan tingkat Inflasi di provinsi Jawa Tengah
tahun 2000-2020



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Grafik 1 terlihat pola garis dari kiri atas menurun ke kanan bawah dengan bentuk parabola. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2000-2020 di Jawa Tengah terdapat hubungan antara INF dengan UMP. Jika INF mengalami penurunan maka UMP mengalami peningkatan, sedangkan jika UMP mengalami penurunan maka INF mengalami peningkatan.

Menurut David Ricardo, upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk memenuhi kehidupan pekerja dan keluarganya serta sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jika upah yang diberikan perusahaan terlalu tinggi, akan memengaruhi jumlah penjualan. Harga akan meningkat sejalan dengan biaya produksi yang tinggi. Jika upah yang diberikan rendah maka pekerja akan hidup miskin. David Ricardo mengatakan bahwa yang menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami yang jumlahnya hanya cukup untuk buruh bertahan hidup (Aryanti et al., 2015).

Keynes menyatakan bahwa upah bukan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja, sehingga apabila terjadi kebijakan upah minimum dalam suatu perekonomian, maka hal tersebut kurang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sebangun dengan pemikiran Keynes, konsep segmentasi pasar tenaga kerja juga berpandangan bahwa dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi, maka permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat upah, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaannya yang sesuai dengan segmen pasarnya (Kryńska & Kopycińska, 2015).

Menurut Irving Fisher, Kenaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Inti dari teori ini yang pertama yaitu inflasi akan terjadi jika ada penambahan jumlah uang beredar baik uang kartal maupun uang giral, hal tersebut juga berhubungan dengan jumlah upah yang diterima oleh para buruh, yang kedua yaitu laju

inflasi ditentukan oleh jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang (Permatasari et al., 2017).

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditunjukkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang yang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Hal tersebut akan menimbulkan *inflationary gap*, ketika *inflationary gap* tetap ada maka selama itu pula proses inflasi terjadi dan berkelanjutan (Santosa, 2017).

Penelitian ini akan mengamati pola kausalitas upah minimum dan inflasi di provinsi Jawa Tengah selama periode 2000-2020. Untuk mengetahui apakah inflasi mempengaruhi upah minimum provinsi ataupun sebaliknya apakah upah minimum provinsi mempengaruhi inflasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan naskah publikasi ini penulis menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada, antara lain:

Dengan menggunakan data *time series* Bulgaria tahun 1991-2014, Dritsaki (2016) menemukan kausalitas Granger satu arah tingkat inflasi menyebabkan upah minimum dengan signifikansi empirik F 0,00094 ($< 0,01$). Pada analisis regresi *Error Correction Model*, ditemukan upah minimum dipengaruhi secara positif oleh tingkat inflasi dan upah minimum sebelumnya dengan koefisien regresi 0,442 dan 0,861, keduanya dengan signifikansi empirik t 0,000 ($< 0,01$).

Kertiasih (2017), menggunakan analisis regresi data panel di Bali tahun 2008-2015, menemukan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap upah minimum regional dengan signifikansi empirik t 0,938 ($> 0,10$) dan 0,881 ($> 0,10$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik.

Zulfikar et al. (2022), menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), dengan data di Indonesia tahun 2000-2020, menemukan bahwa harga minyak dunia dan suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat inflasi, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar 3,463905 dan 6,886212, serta signifikansi empirik t 0,0030 ($< 0,01$) dan 0,0000 ($< 0,01$). Sementara upah minimum tidak berpengaruh terhadap inflasi dengan signifikansi empirik t sebesar 0,3917 ($> 0,10$).

Di provinsi Jawa Timur tahun 2005-2016, Nurastriana (2017), dengan menggunakan uji kausalitas Granger menemukan upah minimum provinsi dan PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dengan signifikansi empirik F 0,9579 ($> 0,10$) dan 0,8852 ($> 0,10$). Inflasi dan PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dengan signifikansi empirik F 0,7454 ($> 0,05$) dan 0,1937 ($> 0,05$). Sementara inflasi dan upah minimum memiliki hubungan kausalitas satu arah dengan signifikansi empirik F sebesar 0,007 ($< 0,01$). Pada analisis regresi *Error Correction Model*, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan jangka pendek di antara ketiga variabel yaitu PDRB, upah minimum provinsi, dan inflasi dengan koefisien regresi 2,7016, 7,1613 dan 3,3015, ketiganya dengan signifikansi empirik t 0,0000 ($< 0,01$).

Dengan menggunakan data *time series* di Indonesia tahun 1997-2014, Wulansari et al. (2015), memakai analisis uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa UMP Jawa dan inflasi Indonesia memiliki hubungan satu arah dengan signifikansi empirik F 0,0529 ($< 0,10$). Sementara UMP luar Jawa dan inflasi tidak memiliki hubungan kausalitas dengan signifikansi empirik F 0,1032 ($> 0,10$) dan 0,9083 ($> 0,10$). Pada uji *Augmented Dickey-Fuller*, dapat disimpulkan bahwa inflasi, UMP Jawa dan UMP Luar Jawa tidak stasioner pada tingkat Level dengan signifikansi empirik t 1,465060 ($< 0,10$), 1,807567 ($< 0,10$) dan 2,638039 ($< 0,10$).

Di provinsi Aceh tahun 1998-2012, menggunakan analisis 2SLS (*Two Stage Least Square*) Safrida et al. (2014), menemukan penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap upah minimum dengan signifikansi empirik t 0,980 ($> 0,05$), 0,718 ($> 0,05$) dan 0,803 ($> 0,05$).

Sayyidah & Effendi (2020), di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2004-2018 menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan inflasi dan kebutuhan hidup layak berpengaruh negatif terhadap upah minimum dengan koefisien regresi sebesar -0,493351 dan -19,52794, serta signifikansi empirik t 0,6315 ($< 0,10$) dan 0,0000 ($< 0,01$). Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap upah minimum dengan signifikansi empirik t 0,911 ($> 0,05$).

Siagian & Hayati (2020), menggunakan analisis regresi data panel pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2014-2018, menunjukkan bahwa output gap dan upah minimum berpengaruh positif terhadap inflasi dengan koefisien regresi 4,4108 dan 1,5305 keduanya dengan signifikansi empirik t 0,0000 ($< 0,01$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik.

Di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011, dengan menggunakan analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif terhadap upah minimum regional dengan koefisien regresi 2,180914 dan 9,503857 dan signifikansi empirik t 0,0000 ($< 0,01$) dan 0,0303 ($< 0,05$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. (Charysa 2013)

Zahari (2014), di provinsi Jambi periode 2000-2013, menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap upah minimum provinsi Jambi dengan koefisien regresi 3,078 dan signifikansi empirik t 0,011 ($< 0,05$). Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap upah minimum di provinsi Jambi dengan signifikansi empirik t 0,376 ($> 0,01$).

Di provinsi D.I. Yogyakarta tahun 1990-2012, menggunakan analisis uji kausalitas Granger, menemukan bahwa terjadi hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan UMR, dimana inflasi mempengaruhi UMR dengan koefisien regresi 5,54130 dan signifikansi empirik F 0,0611 ($< 0,10$). (Azis & Wibowo, 2016)

Dengan menggunakan analisis regresi data panel di provinsi Jawa Barat periode 2011-2019, menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap upah minimum provinsi Jawa Barat dengan koefisien regresi 6,538082 dan signifikansi empirik t 0,0000 ($< 0,01$), sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap upah minimum provinsi Jawa Barat dengan koefisien regresi -2,890015 dan signifikansi empirik t 0,0054 ($< 0,01$). *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. (Tsalsalaila et al. 2022)

Nurrachma et al. (2020), menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), dengan data *time series* di Indonesia tahun 1997-2018, menemukan penawaran tenaga kerja dan ekspor berpengaruh positif dan negatif terhadap upah minimum regional dengan koefisien regresi 5,998756 dan -2,228036 dan signifikansi empirik t sebesar 0,0000 ($< 0,01$) dan 0,0389 ($< 0,05$). Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap upah minimum regional dengan signifikansi empirik t sebesar 0,3561 ($> 0,01$).

Ofori-Abebrese et al. (2017), di Ghana periode 1986-2014, dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan upah minimum dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap inflasi dengan koefisien regresi 3,281383 dan 3,516475 dan signifikansi empirik t 0,0305 ($< 0,05$) dan 0,0245 ($< 0,05$).

Di Rusia dengan memakai analisis regresi *Vector Error Corection Model* (VECM), menemukan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap upah minimum di Rusia periode 2003-2014, dengan koefisien regresi jangka panjang dan jangka pendek inflasi yaitu 2,85 dan 2,88 dan signifikansi empirik t 0,012 ($< 0,05$). (Ivanova 2016)

METODE

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kausalitas Granger, yang formulasi model ekonometriknya adalah sebagai berikut:

$$UMP_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i UMP_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j INF_{t-j} + \varepsilon_{1t}$$

$$INF_t = \sum_{i=1}^m \lambda_i INF_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j UMP_{t-j} + \varepsilon_{2t}$$

di mana:

UMP_t : Upah Minimum Provinsi (Rp)
 INF_t : Inflasi (%)
 $\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}$: Variabel Pengganggu
 m : Jumlah lag maksimum
 $\alpha, \beta, \lambda, \delta$: Koefisien regresi masing-masing variabel

Ada empat kemungkinan kausalitas antara UMP_t dan INF_t :

- Kausalitas satu arah INF_t mempengaruhi atau menyebabkan UMP_t , bila $\sum_{j=1}^m \beta_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^m \delta_j = 0$.
- Kausalitas satu arah UMP_t mempengaruhi atau menyebabkan INF_t , bila $\sum_{j=1}^m \beta_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^m \delta_j \neq 0$.
- Kausalitas dua arah INF_t mempengaruhi atau menyebabkan UMP_t , dan UMP_t mempengaruhi atau menyebabkan INF_t , bila $\sum_{j=1}^m \beta_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^m \delta_j \neq 0$.
- INF_t dan UMP_t independen satu sama lain, bila $\sum_{j=1}^m \beta_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^m \delta_j = 0$.

Data penelitian yang dipakai adalah data *time series* provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2020. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Hasil estimasi model ekonometrik uji kausalitas Granger beserta uji pelengkapanya terangkum dalam Tabel 4.1 - 4.5

Variabel Inflasi (INF)

Hasil uji stasioneritas variabel inflasi (INF) tersaji pada Tabel 1

Tabel 1
Uji stasioneritas variabel INF

Model	δ	τ stat	$\tau(0,05)$	Prob.	AIC
1	-0,243094	-2,158387	-1,961409	0,0332	5,406625
2	0,004912	0,012314	-3,065585	0,9466	5,521012
3	-1,867966	-5,897577	-3,673616	0,0007	5,029885*

Keterangan: *AIC minimum atau model terbaik

Dari Tabel 1 terlihat untuk hasil uji stasioneritas terbaik adalah pada model ke 3. Pada model ini probabilitas statistik τ bernilai 0,0007 ($< 0,01$), sehingga hipotesis data tidak stasioner ($H_0: \delta = 0$) ditolak, berarti variabel inflasi (INF) stasioner.

D.2 Variabel Upah Minimum Provinsi (*UMP*)

Hasil uji stasioneritas variabel upah minimum provinsi (*UMP*) tersaji pada Tabel 4.2

Tabel 2
Uji stasioneritas variabel UMP

Model	δ	τ stat	$\tau(0,05)$	Prob.	AIC
1	0,184726	3,303669	-1,962813	0,9990	24,50455*
2	0,197425	2,365914	-3,052169	0,9998	24,61846
3	1,349281	1,456800	-3,733200	0,9999	24,78628

Keterangan: * AIC minimum atau model terbaik

Dari Tabel 2 terlihat untuk hasil uji stasioneritas terbaik adalah pada model ke 1. Pada model ini probabilitas statistik τ bernilai 0,9990 ($> 0,05$), sehingga hipotesis data stasioner ($H_A: \delta < 0$) diterima, berarti variabel upah minimum provinsi (*UMP*) tidak stasioner sehingga dilakukan 1st difference. Hasil uji stasioneritas 1st difference *UMP* tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3
Uji stasioneritas variabel UMP 1st difference

Model	δ	τ stat	$\tau(0,05)$	Prob.	AIC
1	-0,035652	-0,233766	-1,961409	0,5879	24,87997
2	-0,637052	-1,891230	-3,052169	0,3280	24,88366
3	-1,281323	-3,046217	-3,710482	0,1492	24,67152*

Keterangan: * AIC minimum atau model terbaik

Dari Tabel 3 terlihat untuk hasil uji stasioneritas terbaik adalah pada model ke 3. Pada model ini probabilitas statistik τ bernilai 0,1492 ($> 0,05$), sehingga hipotesis data stasioner ($H_A: \delta < 0$) diterima, berarti variabel upah minimum provinsi (*UMP*) 1st difference tidak stasioner sehingga dilakukan 2nd difference. Hasil uji stasioneritas 2nd difference *UMP* tersaji pada Tabel 4.4.

Tabel 4
Uji stasioneritas variabel UMP 2nd difference

Model	δ	τ stat	$\tau(0,05)$	Prob.	AIC
1	-1,709850	-9,989708	-1,961409	0,0001	24,77226
2	-4,742076	-3,085394	-3,098896	0,0512	25,09551
3	-7,923458	-4,541523	-3,791172	0,0151	24,59991*

Keterangan: * AIC minimum atau model terbaik

Dari Tabel 4 terlihat untuk hasil uji stasioneritas terbaik adalah pada model ke 3. Pada model ini probabilitas statistik τ bernilai 0,0151 ($< 0,05$), sehingga hipotesis data tidak stasioner ($H_0: \delta = 0$) ditolak, berarti variabel upah minimum provinsi (*UMP*) 2nd difference stasioner.

Dari hasil uji stasioneritas variabel inflasi (*INF*) stasioner pada tingkat level sedangkan variabel upah minimum provinsi (*UMP*) stasioner pada tingkat 2nd difference. Sehingga uji kausalitas Granger dilakukan dengan variabel inflasi pada tingkat level yaitu INF dan variabel upah minimum provinsi pada tingkat 2nd difference yaitu DDUMP.

Hasil uji kausalitas Granger pada variabel *INF* dan *UMP* tersaji pada Tabel 5

Tabel 5
Hasil Uji Kausalitas Granger variabel *INF* dan *UMP*

Lag Maksimum	Hipotesis Nol	F	Prob.F
1	DDUMP tidak menyebabkan INF	0,08703	0,7720
	INF tidak menyebabkan DDUMP	0,80734	0,3831
2	DDUMP tidak menyebabkan INF	0,72379	0,5049
	INF tidak menyebabkan DDUMP	0,13597	0,8742
3	DDUMP tidak menyebabkan INF	0,11565	0,9487
	INF tidak menyebabkan DDUMP	0,51189	0,6841
4	DDUMP tidak menyebabkan INF	0,17216	0,9448
	INF tidak menyebabkan DDUMP	0,67100	0,6357
5	DDUMP tidak menyebabkan INF	0,44489	0,7994
	INF tidak menyebabkan DDUMP	0,87531	0,5831

Dari Tabel 4.5 terlihat untuk hasil uji kausalitas Granger lag 1 sampai 5, semuanya memiliki probabilitas dengan signifikansi empirik F ($> 0,10$), menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara upah minimum provinsi dengan tingkat inflasi di provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2020.

PEMBAHASAN

Hasil analisis memperlihatkan tidak adanya hubungan kausalitas dua arah antara upah minimum provinsi dengan tingkat inflasi di provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2020, jadi upah minimum provinsi tidak menyebabkan inflasi, sebaliknya inflasi juga tidak menyebabkan upah minimum provinsi.

Upah minimum provinsi, selama periode yang diteliti, ternyata tidak termasuk salah satu determinan inflasi di Jawa Tengah. Dengan demikian, upah minimum provinsi bisa ditingkatkan di masa yang akan datang. Secara teoritis, fenomena ini kemungkinan terjadi karena kondisi makro perekonomian Jawa Tengah masih *underemployment*, sehingga ketika terjadi kenaikan upah minimum, efek kenaikan permintaan agregatnya tidak menyebabkan terjadinya naiknya biaya produksi yang bisa memicu terjadinya *cost push inflation*. Kenaikan biaya karena kenaikan upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi tidak mempengaruhi inflasi sejalan dengan hasil penelitian Zulfikar et al. (2022) di Indonesia periode 2000–2020 dan Wulansari et al. (2015) di Indonesia selama 1997-2014.

Inflasi tidak menyebabkan upah minimum provinsi tampaknya memperlihatkan inflasi tidak atau kurang diperhitungkan dalam kebijakan penentuan upah minimum provinsi. Kebijakan penentuan upah minimum provinsi, kemungkinan lebih mempertimbangkan agar tidak menyebabkan terjadi peningkatan biaya produksi yang bisa memicu terjadinya *cost push inflation*. Mengingat kondisi makro perekonomian Jawa Tengah kemungkinan masih *underemployment*, maka inflasi sangat layak dipertimbangkan sebagai salah satu konsider utama bagi kebijakan penentuan upah minimum provinsi. Inflasi yang tidak menyebabkan upah minimum provinsi selaras dengan hasil penelitian Kertiasih, (2017) di provinsi Bali periode 2008-2015, Safrida et al. (2014) di provinsi Aceh selama 1998-2012, Zahari (2014) di provinsi Jambi pada kurun 2000-2013, dan Nurrachma et al. (2020) di Indonesia tahun 1997-2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara upah minimum provinsi dengan tingkat inflasi di provinsi Jawa Tengah. Upah minimum provinsi Jawa Tengah tidak termasuk salah satu determinan inflasi di

Jawa Tengah serta Inflasi juga tidak menyebabkan upah minimum provinsi memperlihatkan inflasi tidak atau kurang diperhitungkan dalam kebijakan penentuan upah minimum provinsi.

Terkait hasil penelitian ini, pemerintah Jawa Tengah seharusnya bisa lebih leluasa dalam menaikkan upah minimum provinsi Jawa Tengah di masa akan datang, karena pada tahun 2022 upah minimum provinsi Jawa Tengah termasuk yang paling rendah dibandingkan provinsi lain di pulau Jawa. Inflasi sebaiknya diperhitungkan dalam kebijakan penentuan upah minimum provinsi, karena inflasi menurunkan daya beli upah yang diterima oleh tenaga kerja, sehingga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan permintaan agregat, yang menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan produksi, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

REFERENSI

- Annur, C. M. (2022). *Daftar Lengkap UMP 2023 di Pulau Jawa, Tertinggi DKI Jakarta*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/29/daftar-lengkap-ump-2023-di-pulau-jawa-tertinggi-dki-jakarta>
- Aryanti, H. G., Setiadi, I. O., Hastyorini, I. R., & Sari, K. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Klaten: P.T Cempaka Putih.
- Azis, M. K., & Wibowo, M. G. (2016). Kausalitas Upah Minimum Regional Dengan Laju Inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 178–188.
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4).
- Dritsaki, C. (2016). Realwages, Inflation, and Labor Productivity: Evidences from Bulgaria and Romania. *Journal of Economic & Financial Studies*, 04, 24–36.
- Ivanova, M. A. (2016). Analysis of the nature of cause-and-effect relationship between inflation and wage in Russia. *Studies on Russian Economic Development*, 27, 575–584.
- Kertiasih, L. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(1).
- Kryńska, E., & Kopycińska, D. (2015). Wages In Labour Market Theories. *Journal Folia Oeconomica Stetinensia*, 15(2), 177–190.
- M Nopirin. (2013). *Ekonomi Moneter* (Edisi Keempat). Yogyakarta: BPFE.
- Nurastriana, G. A. (2017). Analisis Kausalitas Antara PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Nurrachma, N., Laut, L. T., & Destiningsih, R. (2020). Pengaruh Penawaran Tenaga Kerja, Inflasi, dan Ekspor Terhadap Upah Minimum Regional di Indonesia Tahun 1997-2018. *Directory Journal of Economic*, 2(1).
- Ofori-Abebrese, G., Azumah, G. K. W., & Pickson, R. B. (2017). Public Sector Wage and Inflation in Ghana. *Journal Asian Economic and Financial Review*, 7(6), 561–572.
- Permatasari, A., Budiartiningsih, R., & Rosyetti. (2017). Pengaruh Investasi Dalam Negeri dan Inflasi Terhadap Jumlah Uang Beredar Dalam Arti Luas di Indonesia Periode 2004-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1).
- Rakhmawati, A., & Boedirochminarni, A. (2018). Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 74–82.
- Safrida, Sofyan, & Syahrani, N. (2014). Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi dan Pasar Kerja di Provinsi Aceh. *Jurnal Agrisep*, 15(2).
- Santosa, A. B. (2017). Analisis Inflasi di Indonesia. *Jurnal Konomika Dan Bisnis Universitas Stikubank*, 445–452.
- Sayyidah, & Effendi, M. (2020). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 373–389.

- Siagian, Y., & Hayati, B. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Output Gap dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi di 33 Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2014-2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1), 110–118.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tsalsalaila, D., Wiralaga, H. K., & Zahra, S. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 101–113.
- Wulansari, R. A., Zainuri, & Wilantari, R. N. (2015). Hubungan Kausalitas Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di Indonesia Periode 1997-2014. *Jurnal Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–8.
- Zahari, M. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(3).
- Zulfikar, A., Rahmi, D., & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Harga Minyak Dunia, Upah Minimum dan Tingkat Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2000–2020. *Jurnal Economics Studies*, 2(1), 1–8.